

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	2
KATA PENGHANTAR	3
BAB 1	
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Metodologi	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II	
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Triwulan II pada Anggaran Tahun 2025	8
2.1.1 Ikhtisar capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
2.2 Anggaran Belanja	13
2.1.2 Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan triwulan II	20
BAB III	
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA	27
3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas	27
3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja	50
BAB IV	51
PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

<u>Tabel :1 Kriteria Penilaian</u>	6
<u>Tabel :2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah</u>	10
<u>Tabel :3 Rekap Realisasi Kinerja dan Anggaran</u>	14
<u>Tabel IV: Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah</u>	28

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga laporan evaluasi hasil rencana kerja daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten tanjung jabung barat tahun 2025, kondisi triwulan II pada bulan juni ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan laporan evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah (RKPD) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan namun kami berharap laporan ini akan tetap memberikan informasi tentang evaluasi rencana kerja perangkat daerah. dan demi kelancaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten tanjung jabung barat pada masa yang akan datang, kami mengharapkan adanya masukan berupa kritik atau saran yang berguna. Terima kasih.

Kuala Tungkal,

Juli 2025



Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Tanjug Jabung Barat

Drs. H. Muhammad Yunus
Pembina Utama muda /IV.c
NIP.19680417198810 1001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) perangkat daerah. Mengacu pada rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, evaluasi terhadap renja tersebut perlu dilakukan pada setiap triwulan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana program dan pelayanan perangkat daerah berjalan sesuai aturan dan tupoksinya serta mengikuti perubahan perkembangan kebijakan daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
2. Rancangan rencana kerja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rancangan rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah pada tahun 2025

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga. Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
21. Peraturan Kepala BKKBN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana

23. telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah KabupatenTanjungJabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025.
32. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 -2026
33. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026.

a. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dan tujuan dari evaluasi hasil renja tahun 2025 adalah

1. Untuk memberikan informasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada triwulan II pada bulan juni tahun 2025;
2. Memberikan informasi perubahan/pergeseran anggaran dan indicator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan output kegiatan, target output kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

b. Tujuan

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD) tahun 2025.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021- 2026.

b. Metodologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi Renja ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II berkenaan. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

TABEL 1. KRITERIA PENILAIAN

N O	KRITERIA PENILAIAN	SIM BO L	INTERVAL NILAI
1	TINGGI	T	85% - 100%
2	SEDANG	S	65% - 85%
3	RENDAH	R	≤40% - 65 %

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 kondisi Triwulan II pada bulan Juni disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

BAB II : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program / kegiatan, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYEI DANA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Triwulan II pada Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Instansi pemerintah Tanjung Jabung Barat khususnya dalam Pengarusutamaan untuk penunjang kesehatan masyarakat telah merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Adapun Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan dengan landasan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dan untuk hasil kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB diukur dengan "Indikator Derajat Kesehatan" dalam penunjang Kesehatan Sebagai salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam mengatasi permasalahan berikut adalah indikator dan target yang akan di capai selama tahun 2025.

Sasaran kinerja dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah khusus di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai empat sasaran kinerja adapun masing – masing Sasaran Kinerja terdiri dari beberapa indikator terdiri dari :

- Kesetaraan Gender, Indikator Kinerja Utama adalah ;
 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, Indikator Kinerja Utama adalah :
 1. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan
- Meningkatnya kualitas keluarga, indikator Kinerja Utama yaitu :
 1. Angka Perceraian

- Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak, terdiri satu indikator Kinerja Utama yaitu :
 1. Peringkat Kabupaten Layak Anak
- Terkendalinya Kuantitas dan kualitas Penduduk serta pemanfaatan bonus demografi, terdiri dari dua indikator Kinerja Utama yaitu :
 1. Angka Total Kelahiran (TFR)/WUS 15- 49 tahun
 2. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
- Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan kualitas pelayanan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, terdiri dari tiga indikator Kinerja Utama yaitu :
 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
 2. Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
 3. Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
- “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah” terdiri dua indikator Kinerja Utama yaitu :
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 2. Nilai SAKIP

Adapun capaian kinerja perangkat daerah pada triwulan II pada tahun anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Triwulan II

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II (APRIL,MEI,JUNI) TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJAB BARAT**

No.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	- Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,5	86,8	97
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5	73,39	104
2.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Ratio kekerasan terhadap Perempuan	3	3,7	122
3.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Perceraian	0,5	0,29	58
4.	Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	NINDYA		
5.	Terkendalinya dan Kualitas serta pemanfaatan bonus demografi	- Angka Total kelahiran / (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun	2,35	2,28	103,27%
		- Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	65	23	282,6%
6.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KR)	- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,68	63,66%	95,47%
		- Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah usia 15-49 tahun	69,7	71,3%	102,29%
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/(Unmeet need)	17,05	5,6%	304,46%

2.1.1 Ikhtisar capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Capaian Kinerja sebagaimana tersebut di atas sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam mencapai sasaran kinerja meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun 2025 target IPG sebesar 89,5 sedangkan target IDG sebesar 70,5. Realisasi IPG sebesar 86,8 sehingga capaian kinerja sebesar 97%. Sementara untuk realisasi IDG pada Tahun 2025 sebesar 73,39 dengan capaian kinerja sebesar 104%. Baik IPG maupun IDG targetnya tercapai bahkan di atas target.
2. Data IPG diperoleh dari Tabel, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DP3AP2KB tidak melakukan kajian dan perhitungan sendiri, Untuk tahun 2025 data IPG dan IDG perhitungannya dilakukan pada Tahun 2025, maka data tahun 2025 masih menggunakan data yang sama di tahun 2023. IPG adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG adalah merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian terhadap IPG dan IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penghitungan oleh BPS, dengan komponen IPG antara lain: (1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Per-kapita. Dan Komponen IDG antara lain (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai menejer, profesional, administrasi dan teknis serta sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dan IPM digunakan untuk mengukur pembangunan manusia berbasis gender di tingkat nasional.
3. IPG merupakan indikator yang mengukur kondisi pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dianalisis hingga tingkat Kabupaten/Kota
4. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas keluarga capaian indikatornya yaitu angka perceraian target Tahun 2025 sebesar 0,75. Tahun 2025 angka cerai sebanyak 688 kasus, dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 sebanyak 331.058 jiwa. Jadi realisasi pada 2025 adalah 2,1 sehingga rasio capaian tahun 2025 sebesar 35,71%., artinya kinerja belum mencapai target karena belum mampu menekan angka perceraian di Tanjung Jabung Barat, Banyak faktor Penyebab tingginya Angka

perceraian salah satunya adalah faktor ekonomi. DP3AP2KB sesuai fungsinya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi tentang Pernikahan.

5. Target angka perceraian tahun 2023 sebesar 1,25. Tahun 2023 angka cerai sebanyak 1.047 kasus, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 326.530 jiwa. Jadi realisasi pada 2023 adalah 3,2 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 321%.
6. Target angka perceraian tahun 2022 sebesar 1. Tahun 2022 angka cerai sebanyak 522 kasus, dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 326.606 jiwa. Jadi realisasi pada 2022 adalah 1,6 sehingga capaian tahun 2022 sebesar 127%.
7. Angka TFR (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 Tahun. TFR ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 2.4 kelahiran per wanita usia subur dan menjadi 2.39 pada tahun 2025 (*Sumber data BPS/SP 2020*). Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini terkait dengan pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran menuju target ideal 2,1 anak per wanita yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026. Adapun upaya penurunan TFR dapat dilakukan dengan :
 - (a) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun (Program GenRe), semakin tinggi usia kawin pertama, akan menurunkan tingkat fertilitas/kelahiran.
 - (b) Tingkat pendidikan perempuan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan berpengaruh signifikan dengan tingkat fertilitas/kelahiran.
 - (c) Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan pendanaan usaha mikro kecil menengah yang mendukung perekonomian masyarakat. Meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada turunnya angka fertilitas.
 - (d) Mengintensifkan wajib belajar 12 tahun, penurunan biaya pendidikan serta subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dalam upaya menunda pernikahan terutama bagi remaja.
 - (e) Strategi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB MKJP seperti IUD, Implant, MOW dan MOP.
 - (f) Meningkatkan kelompok kegiatan (Poktan) secara kualitas dan kuantitas, diantaranya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R, serta UPPKA.

Permasalahan : masih adanya usia perkawinan anak/usia muda.

Penghambat :

- (a) pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah.
- (b) masih berpegang teguh dalam budaya atau stigma banyak anak, banyak rejeki.

Pendorong :

- (a) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pendewasaan usia perkawinan.

- (b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan.
- (c) Pengembangan sektor ekonomi seperti UPPKA.

8. Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19). ASFR 15-19 tahun menunjukkan indikator kelahiran / fertilitas pada perempuan kelompok usia 15-19 tahun. Hasil SP2020 menunjukkan bahwa capaian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan angka 50,80 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun, sementara target 67 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun. Data tersebut menunjukkan hasil capaian lebih tinggi dari target yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan indikator ini melebihi dari target dengan persentase realisasi sebesar 133,8 persen. Hal ini karena ASFR 15-19 tahun berkaitan erat dengan perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan perempuan, budaya dan juga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi usia dini. ASFR 15-19 tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja program Bangga Kencana diseluruh tingkat wilayah. Kebijakan untuk menurunkan ASFR 15-19 tahun harus melibatkan berbagai sektor terkait agar secara bersama-sama peduli untuk menurunkan angka ASFR 15-19 tahun. Upaya penurunan ASFR 15-19 tahun dapat dilakukan dengan pendewasaan usia perkawinan melalui peningkatan usia lama sekolah anak perempuan/ meningkatkan program wajib belajar 12 tahun/SMA, partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi remaja. DP3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melakukan hal tersebut melalui berbagai strategi seperti Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Ketahanan Remaja, UU pernikahan no 19 tahun 2019. Permasalahan tingginya keluarga pra sejahtera 7411 KK dan Keluarga sejahtera I 32974 KK. Penghambatnya terjadinya putus sekolah akibat faktor ekonomi dan kehamilan yang tidak diinginkan/pergaulan bebas pada remaja.

9. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas keluarga. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Dengan demikian i-Bangga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan / program / kegiatan diwilayahnya. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), diketahui bahwa target i-Bangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah 62,56% dengan realisasi capaian 62,61% (*Sumber data: Pemutakhiran PK -22, Pemutakhiran PK-23, Pemutakhiran PK-24*). Nilai i-Bangga menurut dimensi dibagi dalam 3 (tiga) indikator yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan. Capaian ini mengindikasikan

bahwa peran, fungsi dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait, meningkatkan komitmen dan sinergitas antar Instansi/dinas terkait lainnya serta pemangku kepentingan untuk membenahi seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, serta perlu digencarkannya sosialisasi i-Bangga hingga keseluruhan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Permasalahan masih ditemukan masalah social seperti kemiskinan. Penghambat menurunnya hasil komoditi perkebunan seperti pinang, dan banyaknya kasus usia perkawinan dini.

10. Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Prevalensi Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* selanjutnya disebut mCPR, adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi modern yang dimaksud meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) atau steril wanita atau tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria atau vasektomi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral atau *Intra-Uterine Device* (IUD), susuk (*implant*), suntik, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Target mCPR di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah 68,3 %, sedangkan realisasi capaian sebesar 69,9%. Dilihat dari data tersebut diatas, untuk target mCPR sudah tercapai dan melebihi dari target. Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut, diantaranya : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memilih metode kontrasepsi yang efektif dan akurat; (a) Meningkatkan kompetensi dari tenaga medis (dokter dan bidan); (b) Tempat konseling / akses yang mudah dengan memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB (Obgyn Bed, IUD KIT, Implan KIT); (c) Menggiatkan program safari KB; (d) Memperkuat sistim logistik (alat dan obat kontrasepsi/Alokon) diberbagai tingkatan terutama memastikan distribusi dinamis di kabupaten/kota; (e) Serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, media, dunia bisnis, akademisi, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap pemberian pelayanan kontrasepsi. Permasalahan kurangnya tenaga lini lapangan/PLKB. Penghambatnya kurangnya pengetahuan tentang program KB dan masih kurangnya kuelitas dan kuantitas pelayanan KB serta Drop Out akseptor KB (putus pakai akseptor KB).
11. Cakupan pasangan usia subur (pus) yang ingin ber-kb tidak terpenuhi (unmeet need). Unmet Need KB / kebutuhan KB yang tidak terpenuhi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) 15-49 tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak

menggunakan menggunakan kontrasepsi apapun. Target unmet need pada tahun 2025 adalah 18,05% dan capaian 8,2% pada tahun 2025. strategi yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut, antara lain : (a) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memilih metode kontrasepsi yang efektif dan akurat; (b) Tindaklanjut kelangsungan kesertaan ber-KB/mencegah drop out (putus pakai) ber-KB; (c) Meningkatkan kompetensi dari tenaga medis (dokter dan bidan); (d) Meningkatkan layanan (sarana dan prasarana) program KB dan kesehatan reproduksi; (e) Menyediakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) sesuai dengan keinginan akseptor / pilihan metode kontrasepsi; (f) Meningkatkan peran serta suami dalam ber-KB. Permasalahan belum optimalnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang(MKJP), ketersediaan alokon yang sesuai dengan keinginan akseptor KB. Penghambat rasa takut pada efek samping dari ber-KB seperti rasa nyeri, kegemukan. Masih rendahnya partisipasi suami yang ber-KB. PUS merasa sudah tua. Kurangnya tenaga medis yang berkompeten dalam pemasangan KB MKJP. Pendorongnya adanya program metode operasi pria (MOP).

Dari data capaian realisasi Kinerja program triwulan II tahun anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tarik kesimpulan dari hasil rata rata capaian 75,6% dari 5 sasaran kinerja dan 13 Indikator kinerja utama. Adapun dari data tersebut yang telah mencapai target pada tahun anggaran 2025 yakni, Sasaran Kinerja Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan dalam indikator Kinerja Utama Opd Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan pencapaian 102,8% dan Angka Harapan Hidup mencapai 102%, Selain itu dari sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular dari target indikator kinerja utama Persentase Desa/Kelurahan UCI dengan hasil capaian 105,26%, dan sasaran kinerja lainnya yang telah mencapai hasil dari Target, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah dalam Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan hasil pencapaian 101,7% dan Nilai SAKIP Pencapaian 118,24%.

2.2 Anggaran Belanja

1. Pada Tahun Anggaran 2025 dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan pada awal tahun sebesar Rp. 19,813.130.985.-
2. Pembagian Anggaran terdiri dari 10 Program dan 61 Sub Kegiatan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.6.510.941.185,-
 - b) Program Pengarusutamaan gender Rp 670.261.400,-
 - c) Program Perlindungan Perempuan Rp.5.202.436.000,-
 - d) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Rp.108.400.000,-
 - e) Program Pemenuhan Hak Anak Rp.357.894.800,-
 - f) Program Perlindungan Khusus Anak Rp.109.400.000,-
 - g) Program Pengendalian Penduduk Rp. 883.549.800,-
 - h) Program KB Rp.4.140.453.000,-
 - i) Program KS Rp. 1.829.794.800,-

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel rekapian pencapaian realiasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebagai berikut :

TABEL 4

**REKAPITULASI PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT T.A. 2025**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	APBD Murni Rp.	Perkembangan Pelaksanaan		Fisik Real Program %	Si sa Anggaran Rp.
			Realisasi Keuangan			
			Rp.	%		
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.309.448.585	2.794.671.371	44,29	9,3	3.514.777.214
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283.745.000	132.280.000	46,62	0,39	151.465.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.780.800	162.092.187	53,18	0,48	142.688.613
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	312.395.000	111.519.800	35,7	0,33	200.875.200
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.999.800	19.475.000	38,95	0,06	30.524.800
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.505.295.885	1.841.469.574	40,87	5,4	2.663.826.311
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.056.500	119.855.812	38,78	0,35	189.200.688
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	443.576.000	351.630.300	79,27	1,06	91.945.700
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.599.600	56.348.698	56,01	0,18	44.250.902
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDYAAN PEREMPUAN		670.261.400	268.068.000	39,99	1,19	402.193.400
1	Pelembagaan Pengarusutan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	90.607.000	55.568.000	61,33	0,16	35.039.000
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	529.654.400	169.680.000	32,04	0,5	359.974.400
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	50.000.000	42.820.000	85,64	0,13	7.180.000
	Kewenangan Kabupaten/Kota					

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		5.202.436.000	273.391.551	5,26	0,28	4.92 9.04 4.44 9
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten Kota	5.202.436.000	91.152.000	1,75	0,27	5.11 1.28 4.00 0
4. PEROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		108.400.000	6.000.000	5,54	0,01	102. 400. 000
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.600.000	6.000.000	8,62	0,02	63.6 00.0 00
2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	38.800.000	0	0	0	38.8 00.0 00
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		356.094.800	18.000.000	5,05	0,04	338. 094. 800
1	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonperintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	256.095.000	18.000.000	7,03	0,05	238. 095. 000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	99.999.800	0	0	0	99.9 99.8 00
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		109.400.000	204.813.300	187,22	0,38	- 95.4 13.3 00
1	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	12.480.300	31,2	0,04	27.5 19.7 00
2	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100	0,06	0
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	49.400.000	0	0	0	49.4 00.0 00
7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		802.549.800	259.720.000	32,36	0,63	542. 829. 800
1	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	78.876.000	22.000.000	27,89	0,06	56.8 76.0 00

2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	484.873.800	219.275.000	45,22	0,65	265.598.800
3	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	238.800.000	18.445.000	7,72	0,05	220.355.000
8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		4.859.213.000	1.211.800.400	24,94	3,12	3.647.412.600
1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.189.873.000	572.063.400	26,12	1,67	1.617.809.600
2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	9.000.000	18	0,03	41.000.000
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Darah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19.960.000	7.500.000	37,58	0,02	12.460.000
4	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.746.900.000	310.172.000	17,76	0,91	1.436.728.000
5	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan	630.880.000	136.150.000	21,58	0,39	494.730.000
	Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					
6	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Darah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	221.600.000	8.250.000	3,72	0,02	213.350.000
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1.811.794.800	261.630.000	14,44	0,63	1.550.164.800
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	203.974.800	15.450.000	7,57	0,05	188.524.800
2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	129.420.000	0	0	0	129.420.000
3	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Membangun Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.478.400.000	246.180.000	16,65	0,7	1.232.220.000

Kegiatan	9 Program dan 31 Sub	20.229.598.385	4.774.857.071	23,6	15,58	15.4 54.7 41.3 14
-----------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	--------------	--

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten tanjung jabung barat triwulan II pada bulan juni Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Dari Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Realisasi keuangan pada Juni 2025 (Triwulan II) ini sebesar Rp. 4.772.607.071,- dengan persentase capaian akhir sebesar 24%. Sementara itu untuk rata-rata capaian kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 55,13% (Rendah).

Sesuai dengan daftar telampir :

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025				REALISASI KINERJA PADA 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Kerja PD Penanggung jawab		
				K	Satuan	RP	K	Rp	K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15											
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	%	38.849.066.650	100%	7.504.730.209	100%	6.510.941.185	17%	1.081.113.618	26%	1.713.557.798	-	-	43%	2.794.671.416	143%	10.299.401.625	142,61	26,51	Sekretariat Dinas P3AP2KB		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	7	Laporan	25.441.248.208	1	4.303.373.579	1	4.789.565.885	-	902.523.486	-	1.071.226.088	-	-	-	1.973.749.574	1	6.277.123.153	14,29	24,67	Sekretariat DP3AP2KB		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	105	Dokumen	1.082.470.000	15	213.440.000	15	266.120.000	3	63.260.000	4	66.020.000			7	129.280.000	22	p	20,95	#VALU E!	Sekretariat DP3AP2KB		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/Bulan	24.229.778.208	31	4.089.933.579	31	4.505.295.885	31	839.263.486	31	1.002.206.088			31	1.841.469.574	31	5.931.403.153	100,00	24,48	Sekretariat DP3AP2KB		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	30	Bulan	129.000.000	-	-	5	18.150.000	-	-	-	3.000.000			-	3.000.000	-	3.000.000	0,00	2,33	Sekretariat DP3AP2KB		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100	Persen	2.703.577.567	100	431.910.599	100	337.788.000	25	86.784.462	25	75.307.770	-	-	50	162.092.232	150	594.002.831	150,00	21,97	Sekretariat DP3AP2KB		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	84	Paket	49.330.946	12	5.443.000	12	8.000.000	4	3.000.000	4	2.487.066			8	5.487.066	20	10.930.066	23,81	22,16	Sekretariat DP3AP2KB		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1986	Paket	92.610.000	284	17.850.000	284	10.350.000	16	600.000	0	45			16	600.045	300	18.450.045	15,11	19,92	Sekretariat DP3AP2KB		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang	854		228.485.325	166	46.659.200	166	37.277.200	31	7.060.000	1	6.260.000			32	13.320.000	198	59.979.200	23,19	26,25	Sekretariat DP3AP2KB		

	disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket				Paket						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84	Paket	353.672.296	12	60.638.495	12	52.819.200	4	17.930.000	2	16.893.259			6	34.823.259	18	95.461.754	21,43	26,99	Sekretariat DP3AP2KB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	34	Laporan	1.958.479.000	2	301.319.904	2	229.341.600	-	58.194.462	0	49.667.400			0	107.861.862	2	409.181.766	5,88	20,89	Sekretariat DP3AP2KB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai	100	Persen	399.850.000	100	-	100	106.600.000	3,6	3.750.000	50	52.598.698			54	56.348.698	153,6	56.348.698	153,6	14,09	Sekretariat DP3AP2KB
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77	Paket	179.850.000	0	-	77	81.600.000	-	-	94	48.848.698			94	48.848.698	94	48.848.698	122,0	27,16	Sekretariat DP3AP2KB
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15	Dokumen	125.000.000	0	-	3	25.000.000	-	3.750.000	0	3.750.000			-	7.500.000	0	7.500.000	0,00	6,00	Sekretariat DP3AP2KB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48	unit	1.365.317.350	48	1.580.335.998	48	382.355.000	3	18.475.000	12	93.044.800			15	111.519.800	63	1.691.855.798	131,2	123,92	Sekretariat DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkannya	112	Unit	478.352.150	16	69.185.632	16	102.390.000	1	5.410.000	5	24.105.600			6	29.515.600	22	98.701.232	19,64	20,63	Sekretariat DP3AP2KB
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	103	Unit	250.950.000	22	19.880.000	17	36.100.000	0	-	11	9.432.000			11	9.432.000	33	29.312.000	32,04	11,68	Sekretariat DP3AP2KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	7	Unit	329.896.500	2	1.438.232.866	1	197.470.000	-	9.945.000	-	53.790.000			-	63.735.000	2	1.501.967.866	28,57	455,28	Sekretariat DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkannya	98	Unit	306.118.700	14	53.037.500	14	46.395.000	1	3.120.000	0	5.717.200			1	8.837.200	15	61.874.700	15,31	20,21	Sekretariat DP3AP2KB
Perencanaan, Penganggaran, dan	Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan	74	Dokumen	711.286.52	14	111.694.40	14	85.999.800	2	10.425.00	2	9.050.000			4	19.475.00	18	131.169.40	24,32	18,44	Sekretariat DP3AP2KB

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			5	dokumen	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen				Dokumen	0		0			B
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34		245.834.000	0	-	6	61.499.800	1	6.825.000	1	5.400.000			2	12.225.000	2	12.225.000	5,88	4,97	Sekretariat DP3AP2KB
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	252.434.000	0	-	4	24.500.000	1	3.600.000	1	3.650.000			2	7.250.000	2	7.250.000	8,33	2,87	Sekretariat DP3AP2KB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	182	Unit	6.146.702.000	33	851.717.000	33	499.576.000	-	-	23	351.630.300	-	-	23	351.630.300	56	1.203.347.300	30,77	19,58	Sekretariat DP3AP2KB
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	103	Unit	474.700.000	51	30.125.000	20	84.076.000	-	-	7	28.069.680			7	28.069.680	58	58.194.680	56,31	12,26	Sekretariat DP3AP2KB
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	668.000.000	8	69.592.000	8	415.500.000	-	-	36	323.560.620			36	323.560.620	44	393.152.620	91,67	58,86	Sekretariat DP3AP2KB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	1.992.585.000	100	225.698.633	100	309.056.500	19,14%	59.155.670	19,64%	60.700.142	-	-	38,78%	119.855.812	100	345.554.445	100,39	17,34	Sekretariat DP3AP2KB
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	16.175.000	1	3.000.000	1	3.250.000	-	500.000	-	750.000			-	1.250.000	1,00	4.250.000	16,67	26,28	Sekretariat DP3AP2KB
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	233.000.000	1	37.358.631	1	90.226.500	-	6.605.670	-	7.900.142			-	14.505.812	1,00	51.864.443	16,67	22,26	Sekretariat DP3AP2KB
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	1.743.410.000	1	185.340.002	1	215.580.000	-	52.050.000	-	52.050.000			0	104.100.000	1,00	289.440.002	16,67	16,60	Sekretariat DP3AP2KB
Meningkatnya Implementasi Pengarus Utamaan Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	10%	%	3.798.292.100	10%	506.190.035	10%	670.261.400	1,8%	125.328.000	3,16%	142.740.000	-	-	5,0%	268.068.000	15%	774.258.035	149,60	20,38	Bid. Pemberdayaan Perempuan

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	90	Lembaga PUG	664.960.608	15 Lembaga PUG	36.485.000	15 Lembaga PUG	90.607.000	8 Lembaga PUG	51.068.000	0 Lembaga PUG	4.500.000	-	-	8 Lembaga PUG	55.568.000	23	92.053.000	25,56	13,84	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota	77	Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	15 Dokumen	50.607.000	8 Dokumen	29.572.000	- Dokumen	-	-	-	8 Dokumen	29.572.000	8	29.572.000	10,39	29,57	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggara PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	46	orang	200.000.000	15 orang	36.485.000	15 orang	40.000.000	8 orang	21.496.000	7 orang	4.500.000	-	-	15 orang	25.996.000	30	62.481.000	65,22	31,24	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi masyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1.400	Orang	2.877.897.642	200 orang	448.015.035	200 orang	529.654.400	27 Orang	71.260.000	50 Orang	98.420.000	-	-	77 orang	169.680.000	277	617.695.035	19,79	21,46	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Dokumen	2.877.897.642	5 Dokumen	448.015.035	4 Dokumen	529.654.400	1 Dokumen	71.260.000	1 Dokumen	98.420.000	-	-	2,0 Dokumen	169.680.000	7	617.695.035	29,17	21,46	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	30	Lembaga Layanan PP	255.433.850	10 Lembaga Layanan PP	21.690.000	5 Lembaga Layanan PP	50.000.000	0 Lembaga Layanan PP	3.000.000	5 Lembaga Layanan PP	39.820.000	-	-	Lembaga Layanan PP	42.820.000	#VALUE!	64.510.000	#VALUE!	25,26	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	50		255.433.850	1	21.690.000	5	50.000.000	0	3.000.000	5	39.820.000			5	42.820.000	6	64.510.000	12,00	25,26	Bid. Pemberdayaan

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		Lembaga		Lembaga	Lembaga Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga	Lembaga	Lembaga	Lembaga				Lembaga						Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	100 %	%	1.127.429.750	100%	354.358.451	100%	5.202.436.000	2%	78.802.000	27%	12.350.000	-	-	29%	91.152.000	129%	445.510.451	129,00	39,52	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan	1	Kasus	350.000.000	5 kasus	172.118.900	1 Kasus	5.202.436.000	- Kasus	78.802.000	- Kasus	12.350.000	-	-	- Kasus	91.152.000	5	263.270.900	500,00	75,22	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150	Orang	350.000.000	30 Orang	64.240.000	30 Orang	123.124.000	7 Orang	28.300.000	8 Orang	12.350.000			15 Orang	40.650.000	45	104.890.000	30,00	29,97	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	1		-	8 Layanan	107.878.900	8 Layanan	5.079.312.000	3 Layanan	50.502.000	0 Layanan	-			3 Layanan	50.502.000	33	158.380.900	3.300	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga	10%	%	650.000.000	2%	63.256.000	2%	108.400.000	0%	-	0%	6.000.000	-	-	0%	6.000.000	2%	69.256.000	20,00	10,65	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	1000	Keluarga	200.000.000	200 Keluarga	63.256.000	200 Keluarga	38.800.000	- Keluarga	-	- Keluarga	6.000.000	-	-	- Keluarga	6.000.000	200	69.256.000	20,00	34,63	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	63.256.000	4 Dokumen	38.800.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-			- Dokumen	-	4	63.256.000	20,00	31,63	Bid. Pemberdayaan Perempuan

	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Hikekeluargaan dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pusat layanan keluarga	25		450.000.000	5	-	5	69.600.000	0	-	0	6.000.000		-	6.000.000	5	6.000.000	20,00	1,33	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	120	Orang	350.000.000	0	-	30	69.600.000	0	-	0	6.000.000	-	-	-	0	-	0	0,00	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	54%	%	2.372.219.269	49%	428.334.400	53%	357.894.800	4,74%	9.000.000	5,26%	9.000.000	-	-	10%	18.000.000	59%	446.334.400	109,26	18,82	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	75	Lembaga PHA	1.342.050.744	50	149.139.600	70	257.895.000	2	9.000.000	5	9.000.000	-	-	7	18.000.000	57	167.139.600	76,00	12,45	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	195	Organisasi	582.050.744	40	130.379.600	45	163.762.000	2	9.000.000	5	9.000.000			7	18.000.000	47	148.379.600	24,10	25,49	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	25	Dokumen	760.000.000	5	18.760.000	5	94.133.000	-	-	-	-			-	5	18.760.000	20,00	2,47	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas	100		1.030.168.525	20	279.194.800	20	99.999.800	-	-	-	-	-	-	-	20	279.194.800	20,00	27,10	Bidang Perlindungan dan	

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	hidup anayng dilakukan penguatan dan pengembangan		Sekolah		Sekolah	hidup anayng dilakukan penguatan dan pengembangan	Sekolah		Sekolah		Sekolah					Sekolah					Pemenuhan Hak Anak
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	30,000	Orang	272.905,925	6000 Orang	241.014,800	6000 Orang	50.000.000	0	-	-	-	-	-	-	6000	241.014,800	20,00	88,31		Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	18	Dokumen	250.000,000	3 Dokumen	38.180,000	3 Dokumen	49.999,800	0	-	-	-	-	-	-	3	38.180,000	16,67	15,27		Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus	27,30%	%	2.090.000,000	25,50%	411.621,980	26,90%	109.400,000	6%	24.578,700	0%	7.901,600	-	-	6,00%	32.480,300	31,50%	444.102,280	115,38	21,25	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	30	Orang	340.000,000	35 Orang	139.852,980	30 Orang	60.000,000	12	24.578,700	10	7.901,600	-	-	22	32.480,300	57	172.333,280	190,00	50,69	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang	240.000,000	30 Orang	30.943,980	30 Orang	40.000,000	3	4.578,700	10	7.901,600	-	-	13	12.480,300	43	43.424,280	28,67	18,09	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	60	Layanan	100.000,000	30 Layanan	108.909,000	30 Orang	20.000,000	30	20.000,000	-	-	-	-	30	20.000,000	60	128.909,000	100,00	128,91	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan	109		1.020.000,000	15	99.436,000	19	49.400,000	0	-	0	-	-	-	-	15	99.436,000	13,76	9,75		Bidang Perlindungan dan

	Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perlindungan khusus		Unit layanan PA		Unit Layanan PA		Unit layanan PA		Unit Layanan PA		Unit Layanan PA				Unit Layanan PA						Pemenuhan Hak Anak	
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	85	Orang	180.000.000	17 Orang	76.488.000	19 Orang	49.400.000	0	-	-	-	-	-	Orang	-	-	17	76.488.000	20,00	42,49	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Terkendali nya Kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,9	%	1.602.992.000	1,91	282.965.000	1,91	883.549.800		112.050.000		147.670.000	-	-	1,91	259.720.000	1,9	542.685.000	1,91	33,85	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak an	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk	100 %	%		100%		100%		13%		17%		29%		100%		100%					
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	19	Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	805.000.000	3	109.921.000	3	78.876.000	0,5	12.000.000	1	10.000.000	-	-	2	22.000.000	5	131.921.000	23,68	16,39	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak an	
	Advokasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTs, Jalur Nonformal, dan informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTs, Jalur Nonformal, dan informal	111	Satuan Pendidikan	520.000.000	0	0	23	78.876.000	3	12.000.000	0	10.000.000			3	22.000.000	3	22.000.000	0,03	4,23	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak an	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	19	Profil KKBPk	797.992.000	3	173.044.000	3	804.673.800	0,5	100.050.000	1	137.670.000	-	-	2	237.720.000	5	410.764.000	23,68	51,47	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak an	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1		0	0	0	1	62.000.000		15.000.000	0	15.000.000				-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	55	Dokumen	440.000.000	13	32.064.000	13	503.873.800	2	85.050.000	3	104.225.000				5	189.275.000	18	221.339.000	32,73	50,30	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak
	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	2	Dokumen	2.000.000			1	82.800.000	0	-	0	-				-	-	-	-	-	-	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	13	Dokumen	2.000.000		61.880.000	13	156.000.000	0	-	3	18.445.000				3	18.445.000	3	80.325.000	23,08	4.016,25	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak
	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,58%	5.946.405.632	19,62%	3.099.978.500	19,60%	4.140.453.000	5,30%	113.430.000	18,50%	929.705.400				23,80%	1.043.135.400	43,42%	4.143.113.900	221,30	69,67	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak
s	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	105	Kali	911.000.000	22	1.914.757.500	21	1.028.140.000	2	70.200.000	10	239.972.000				12	310.172.000	34	2.224.929.500	32,38	244,23	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerak
	Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa	89		760.000.000	21	168.665.000	21	161.140.000	0	-	-	13.250.000				-	13.250.000	21	181.915.000	23,60	23,94	Bid. Pengendalian

Mitra Kerja	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi				Organisasi						Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	7	Dokumen	145.000.000	1	149.574.000	1	100.000.000	0	-	-	86.047.000			-	86.047.000	1	235.621.000	14,29	162,50	Bid. Pengendalian, Penyuluhan & Penggerakan
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Kordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Kordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	2.000.000		354.200.000	1	195.000.000	0	-	-	27.790.000			-	27.790.000	-	381.990.000	0,00	19,099,50	Bid. Pengendalian, Penyuluhan & Penggerakan
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Laporan	2.000.000		759.918.500	1	572.000.000	0	70.200.000	-	112.885.000			-	183.085.000	-	943.003.500	0,00	47,150,18	Bid. Pengendalian, Penyuluhan & Penggerakan
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan penggerakan program KKBP	100%	Persen	3.687.405.632	100%	358.824.600	100%	2.189.873.000	2%	35.730.000	100%	536.333.400	-	-	102%	572.063.400	100%	930.888.000	100,00	25,25	Bid. Pengendalian, Penyuluhan & Penggerakan
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1172	orang	800.000.000	268	60.379.800	268	1.072.000.000	0	-	268	230.550.000			268	230.550.000	536	290.929.800	45,73	36,37	Bid. Pengendalian, Penyuluhan & Penggerakan

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	52		1.209.405.632	12	298.444.800	12	1.117.873.000	1	35.730.000	4	305.783.400				5	341.513.400	17	639.958.200	32,69	52,92	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100 %	%	796.000.000	20%	575.356.600	100%	680.880.000	1%	4.500.000	65%	140.650.000	-	-	65%	145.150.000	85%	720.506.600	85,33	90,52		
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2218	Orang	2.000.000	-	548.846.600	600 Orang	630.880.000	0 Orang	-	388 Orang	136.150.000	388,00	684.996.600	17,49	34,249,83						Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	72	Laporan	460.000.000	12,00	26.510.000	12	50.000.000	1	4.500.000	4	4.500.000			5	9.000.000	17,00	35.510.000	23,61	7,72	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100 %	Persen	552.000.000	100%	251.039.800	100%	241.560.000	1%	3.000.000		12.750.000	-	-	1%	15.750.000	101%	266.789.800	101,20	48,33	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	300	Organisasi	300.000.000	50	19.609.800	50	19.960.000	8	3.000.000	-	4.500.000			8	7.500.000	58	27.109.800	19,33	9,04	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
Pelaksanaan dan pengelolaan Program	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas	21		2.000.000		231.430.00	49	221.600.00	0	-	-	8.250.000			-	8.250.000	-	239.680.00	-	11,984	Bid. KB & Ketahanan	

	Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kampung			0	Kampung	0	Kampung		Kampung				Kampung		0		,00	Kesejahteraan Keluarga	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%	%	2.954.000.000	100%	1.942.045.039	100%	1.829.794.800	0,2%	4.500.000	88,95%	257.130.000	-	-	89%	261.630.000	189%	2.203.675.039	189,15	74,60	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS	100	orang	2.954.000.000	21 Poktan	1.942.045.039	100 Orang	351.394.800	2 Orang	4.500.000	45 Orang	10.950.000	-	-	47 Orang	15.450.000	68	1.957.495.039	68,00	66,27	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5	Laporan	870.000.000	1 Laporan	170.982.039	1 Laporan	98.900.000	0 Laporan	4.500.000	- Laporan	4.500.000			- Laporan	9.000.000	1 Kelompok	179.982.039	20,00	20,69	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50	Unit	750.000.000	25 Unit	298.419.000	10 Unit	129.420.000	0 Unit	-	- Unit	-			- Unit	-	25	298.419.000	50,00	39,79	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0		-	0	-	1 Laporan/Dokumen	104.000.000	0 Laporan/Dokumen	-	- Laporan/Dokumen	-			- Laporan/Dokumen	-	-	-	-	-	
	Orientasi Pelaksanaan Teknis Pengelola Ketahanan	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan teknis	11		332.000.000	0	-	40	19.074.800	0	-	45	6.450.000	-	-	45	6.450.000	45	6.450.000	409,09	1,94	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan

	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan usaha Peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga(BKB,BKR,BKL,PKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/usaha peningkatan pendapatan keluargaakseptor (UJPPKA)		Orang		Orang		Orang		Orang					Orang						aan Keluarga
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					-	1	1.478.400.000	0	-	0	246.180.000			-	246.180.000	-	246.180.000	-	-	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/ Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1	672.000.000	0	-	-	111.900.000				111.900.000	-	111.900.000	-	-	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					1	806.400.000	0	-	-	134.280.000				134.280.000	-	134.280.000	-	-	
			6,2088		59.750.405.401	5,0612	14.593.479.614	19.813.130.985		1.548.802.318		3.226.054.798			-	4.774.857.116	5,0612	19.368.336.730	1.078,22	315,26	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																			81,52	32,42	
Prediksi Kinerja Program																					

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. Pelayanan kesehatan yang masih belum sepenuhnya Terealisasi karna anggaran kas kegiatan di rencanakan pada triwulan III atau triwulan IV
2. Proses pencairan dana yang perlu bertahap
3. Kinerja pelayanan kesehatan yang belum didukung oleh sarana dan prasarana secara optimal.
4. Berkoordinasi dengan pelaksana tugas pelayanan pada unit kerja balai di setiap kecamatan.
5. Mengevaluasi kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.
6. Menyusun strategi percepatan pelaksanaan kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang Kesehatan untuk mewujudkan Gerakan masyarakat hidup sehat, penuntasan stunting serta pelayanan Kesehatan yang terdidik, terlatih proporsional dan professional.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil–hasil yang dicapai maupun kegagalan–kegagalan yang dihadapi akan menjadi motivasi bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Kuala Tungkal, Juli 2025

KEPALA DINAS

Drs. H. M. HAMMAD YUNUS